

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis faktor-faktor kesenjangan antara penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa realisasi PAD yang dicapai belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi PAD yang relatif rendah menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perencanaan pendapatan dan capaian aktual, yang mencerminkan belum optimalnya kinerja pengelolaan PAD pada Dinas PUPR Kabupaten TTU.

1. Proses penetapan target PAD pada Dinas PUPR Kabupaten TTU Tahun 2024 pada umumnya masih bersifat administratif dan normatif, serta belum sepenuhnya didasarkan pada analisis potensi riil yang komprehensif. Penetapan target cenderung mengacu pada data historis tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan secara memadai kondisi aktual sumber pendapatan, kapasitas operasional, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memengaruhi kemampuan dinas dalam merealisasikan PAD. Kondisi tersebut menyebabkan target PAD yang ditetapkan kurang mencerminkan kemampuan riil organisasi dalam menghasilkan pendapatan.
2. Kesenjangan antara target dan realisasi PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan kualitas

dan kuantitas sumber daya manusia, belum optimalnya sistem administrasi dan pengawasan pemungutan, serta belum akuratnya pendataan potensi PAD, khususnya yang bersumber dari retribusi pemanfaatan aset dan pelayanan teknis. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya tingkat kepatuhan wajib retribusi, keterbatasan kapasitas ekonomi masyarakat, serta kebijakan dan regulasi tarif yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara simultan berkontribusi terhadap rendahnya realisasi PAD dan memperlebar kesenjangan antara target dan capaian pendapatan.

Dengan demikian, kesenjangan antara target dan realisasi PAD pada Dinas PUPR Kabupaten TTU Tahun 2024 tidak hanya menunjukkan ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga mencerminkan perlunya perbaikan mendasar dalam mekanisme penetapan target, pengelolaan, dan pemungutan PAD agar perencanaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih realistis, terukur, dan akuntabel.

6.2 Saran

1. Bagi Dinas PUPR

Dinas PUPR disarankan melakukan perbaikan mekanisme penetapan target PAD melalui penyusunan kajian potensi pendapatan yang akurat dan berbasis kondisi riil. Pengelolaan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah, khususnya alat berat dan peralatan laboratorium, perlu ditingkatkan agar tetap dalam kondisi operasional dan produktif. Selain itu, alokasi anggaran pemeliharaan aset produktif perlu diprioritaskan guna

mencegah kerusakan berkepanjangan yang dapat mengurangi potensi pendapatan. Penetapan target PAD pada periode berikutnya juga perlu disusun secara adaptif terhadap dinamika kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran daerah. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dapat dilakukan melalui penyempurnaan sistem pengelolaan sewa, penguatan fungsi pengawasan, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji kesenjangan target dan realisasi PAD dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian juga dapat diperluas dengan melibatkan perangkat daerah lain sebagai objek kajian guna memperoleh perbandingan yang lebih luas. Selain itu, penambahan variabel seperti efektivitas pengelolaan aset, kebijakan fiskal daerah, atau kinerja pengelolaan PAD dapat memperkaya analisis. Penggunaan data time series beberapa tahun juga dianjurkan untuk melihat tren kesenjangan PAD secara lebih mendalam.